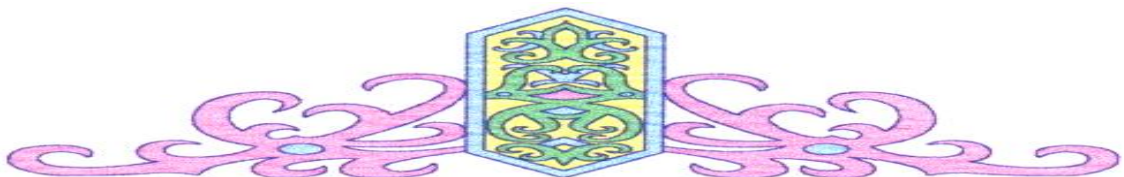


**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Katingan Tahun 2025 dirancang dan tersusun dengan baik.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan 2024-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama periode 2024-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini menyajikan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan informasi tentang rencana capaian kinerja dan rancangan dana indikatif yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Kami berharap semoga Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pembangunan daerah Kabupaten Katingan khususnya dalam bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dapat meningkat dan lebih baik lagi.

Kasongan, Agustus 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KATINGAN**



PIMANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19650107 198603 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra..... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD..... 26

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 43

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN 45

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SOPD 48

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 50

4.1 Program..... 50

4.2 Kegiatan 50

BAB V. PENUTUP 63

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi Renja Tahun Lalu.....	11
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026	23
Tabel II.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Katingan	33
Tabel II.4	Program Dan Kegiatan Usulan Masyarakat Dari Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Katingan	44
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan 2024-2026	49
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan membuat Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan Dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penegakan Perda, Perbup dan Keputusan Bupati, memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Dalam penyusunan Renja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan mengacu pada tugas pokok dan fungsi, dan adanya peluang dan tantangan di Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. Perencanaan pembangunan di Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dengan tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolak ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
 - t. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 734);
 - u. Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025 adalah menjabarkan perencanaan pembangunan di bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran selama 1 (satu) tahun anggaran 2025.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun anggaran rencana. Adapun penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Katingan tahun 2025 bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran pada tahun 2025;
- b. Sebagai pedoman untuk penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan;
- c. Untuk mencapai penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika Penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, adapun dalam Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, adapun dalam bab I pendahuluan, meliputi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-P sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, meliputi :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III ini Dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025 selain didasarkan pada rumusan issue-isue penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan seperti :

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV ini memuat Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan 2024-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran

BAB V PENUTUP

Bab V ini Hal-hal yang perlu ditambahkan

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Renstra PD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 dan pencapaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan 2024-2026 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Hal.495 Tabel T-E.1, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam uraian sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

URUTAN	RENCANA CAPAIAN	KATEGORI CAPIAN	KODE
1	≥ 100	Sangat Bagus	
2	$75 \leq 100$	Berhasil	
3	$55 \leq 75$	Cukup berhasil	
4	≤ 55	Kurang berhasil	

Sumber data Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024 telah melaksanakan 3 (tiga) program yang tercantum dalam penetapan kinerja dengan 1 (satu) program yang sifatnya non urusan atau supporting terhadap program utama atau urusan wajib yang berjumlah 2 (dua) Program. Proporsi Anggaran Perubahan Tahun 2024 yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Sebesar Rp. 33.818.703.808,00, meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 28.781.850.019,00., realiasi sebesar Rp. 28.096.634.541,00, dengan tingkat capaian realisasi anggaran 97.62 %, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 3.029.985.184,00, realiasi sebesar Rp.3.014.118.149,00,

dengan tingkat capaian realisasi anggaran 99,48 %, adapun dalam rangka mendukung Proram Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 2.006.868.605,00, realiasi sebesar Rp. 1.999.140.633,00, dengan tingkat capaian realisasi anggaran 99,61 %. Anggaran dalam rangka mendukung 3 (tiga) prorgam bersumber dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 33.818.703.808,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 33.109.895.323,00, dengan tingkat capaian sebesar 97,90 % atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Berhasil”. Adapun Rincian evaluasi realisasi program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Katingan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Nilai LAKIP	B	B	B	B	100
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100

1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	53 Org	52 Org	52 Org	52 Org	95,07
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Org	52 Org	52 Org	52 Org	95,07
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	100
1.05.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapat pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100

1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan peliharanya Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	100
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100

1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan	Persentase Kasus	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100
---------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan					
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	100
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	48 laporan	48 laporan	48 laporan	48 laporan	100
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Laporan Gangguan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100

	Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda yang ditegakan	4 Perda	4 Perda	4 Perda	4 Perda	100
1 05 02 2.02 0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Diklat Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Diklat	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100
1 05 02 2.03 0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	100

1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100
1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
1 05 04 2.01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	100
1 05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan yang dianalisis merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maupun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Renstra Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sub Urusan Kebakaran, adapun dalam BAB II Pasal 2 huruf d angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan “Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran”, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan diatur melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan program pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengacu peraturan perundang-undangan;
- b. Perumusan kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan produk hukum

lainnya;

- d. Pelaksanaan dan penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan kebijakan dalam perlindungan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran;
- g. Penyelenggaraan dan pengelola sarana prasarana kantor;
- h. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan kantor;
- i. Pengoptimalisasian kinerja kantor dalam mencapai visi dan misi Kabupaten;
- j. Perumusan kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Penetapan Rencana Kerja Tahunan, Kebijakan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dan program di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Penyelenggaraan, pengordiniran, pengarahan dan pengaturan kegiatan Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan sesuai petunjuk dan ketentuan sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
- o. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. Penertiban dan penindakan masyarakat atau badan hukum/aparatur daerah yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- q. Pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum/aparatur daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan kepala daerah;
- r. Penindakan represif non yustisial terhadap warga Masyarakat atau badan hukum/aparatur daerah yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- s. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah urusan pemadam kebakaran; dan
- t. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Katingan sebagai

tindak lanjut.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan di dukung dengan Sumber Daya manusia dapat kami golongkan menurut jenis Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga didukung SDM Satlinmas, adapun data kami sajikan dalam tabel.1, dibawah ini :

1. Menurut Pangkat/Golongan :

Tabel.1
Komposisi Pegawai ASN dan PPPK Satpol PP
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Katingan Menurut Golongan
Tahun 2024

No	Pangkat/Gol	Jumlah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV	5	-	5
2	III	31	1	32
3	II	8	3	11
4	PPPK Gol V	5	-	5
JUMLAH		49	4	53

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan Per 31 Desember 2024

2. Menurut Pendidikan :

Tabel.2
Eksisting Komposisi Pegawai Satpol PP dan Damkar ASN dan PHL
Kabupaten Katingan Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2023 – 2024

No	Pendidikan	Eksisting ASN dan PPPK Tahun 2023	Eksisting ASN dan PPPK Tahun 2024	Eksisting PHL Tahun 2023	Eksisting PHL Tahun 2024	Ket
1	Magister		3	-	-	
2	Sarjana		23	25	24	
3	Diploma		-	1	1	
4	SLTA		27	281	276	
5	SLTP		-	-	-	
JUMLAH			53	307	302	

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan Per 31 Desember 2024

3. Menurut Jenis Kelamin/gender :

Tabel. 3
Komposisi Pegawai Satpol PP dan Damkar ASN dan PHL
Kabupaten Katingan Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender
Tahun 2023-2024

No	Jenis Kelamin	Tahun		Keterangan
		2023	2024	
1	Laki-Laki	323	323	
2	Perempuan	34	34	
JUMLAH		357	357	

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kabupaten
Katingan Per 31 Desember 2024

4. Data Satlinmas :

Tabel. 4
Data Satlinmas Desa/Kelurahan Per - kecamatan dan Desa/Kelurahan
Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Linmas	Jenis Kelamin	
				L	P
1.	Katingan Hilir	8	37	37	-
2.	Tewang Sanggalang Garing	10	63	63	-
3.	Katingan Kuala	16	88	88	-
4.	Mandawai	7	29	29	-
5.	Kamipang	9	36	36	-
6.	Tasik Payawan	8	32	32	-
7.	Pulau Malan	14	61	61	-
8.	Katingan Tengah	16	101	101	-
9.	Sanaman Mantikei	14	73	73	-
10.	Marikit	18	100	100	-
11.	Katingan Hulu	23	91	91	-
12.	Petak Malai	7	48	48	-
13.	Bukit Raya	11	47	47	-
14.	Linmas Kelurahan		57	57	-
JUMLAH		161	863	863	-

Data Bidang Linmas, Per 31 Desember 2024

Adapun Analisis capaian Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan, berikut matrik target Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026, realisasi pencapaian kinerja pelayanan dengan diperoleh perumusan sebagai tolak ukur dalam indikator kinerja sebagaimana tabel.1 dibawah ini:

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026
Kabupaten Katingan

No	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional (Permendagri 59/2021)	Rumus/ Formula	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Renstra PD			Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(12)	(13)	(15)
	Tujuan										
	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	(Tahun N-1 Dikurangi Tahun N) X 100%	Persentase	10	10	10	10	10	10	
	Sasaran										
	Nilai SAKIP Satpol. PP		Nilai Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,15	69,50	69,60	69,68	-	69,60	
	Persentase Penegakan Perda		Jumlah Perda/Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakan dibagi Jumlah Keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	100	

	Tujuan										
	Jangka Waktu Tanggap Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) Oleh Pemadam Kebakaran/ Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X × 100%	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Sasaran										
	Persentase pelayanan Kebakaran dan non kebakaran		Jumlah Kebakaran dan Non Kebakaran yang terlayani dibagi Jumlah Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaporkan X 100%	Persentase	100	100	100	100	100	100	

I	PROGRAM										
---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Permendagri 86/2017									
	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol.PP dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Pelanggaran Perda yang ditangani		Jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani dibagi Jumlah Pelanggaran Yang diidentifikasi Satpol PP dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	100	
II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										
	Presentase penanganan kejadian kebakaran	Permendagri 59/2021	Jumlah kejadian kebakaran dan Penyelamatan yang tertangani dibagi Jumlah Kejadian Kebakaran dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pada dasarnya hakekat otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun fungsi Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai fungsi sebagaimana berikut :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Analisis isu-isu strategis dimulai dengan mengelompokkan isu-isu strategis hasil identifikasi baik isu strategis tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Katingan, sebagaimana uraian berikut :

1. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah;
2. Banyaknya Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih sering terjadi menjelang Tahun Politik;
3. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman;
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kondisi tentram dan tertib di masyarakat;
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP serta Linmas;
6. Masih kurangnya kades/lurah terkait pemahaman fungsi Satlinmas dalam Trantibum terkait dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar; dan
7. Kesiapan Satpol PP pada tahun 2024 dalam menghadapi tahun politik potensi angka pelanggaran gangguan trantibum meningkat;
8. Sarana dan prasarana pendukung operasional yang masih minim;
9. Penegakan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Satpol PP;
10. Dokumen perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Satpol PP belum tersusun dengan baik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta sub pemadam kebakaran;
11. Masih banyaknya masyarakat/ dan atau badah hukum yang melanggar Perda/Perkada;
12. Belum Optimalnya pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum untuk mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
13. Belum Optimalnya koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparat lainya;
14. Kurangnya Jumlah Apartur/Personil Satpol PP dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP;
15. Masih Tingginya Angka Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih rendah;
18. Belum optimalnya pelaksanaan cakupan patroli pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara menyeluruh;

2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan memiliki tantangan dan peluang baik itu dari internal maupun eksternal. Peluang dan tantangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini :

2.3.2.1 Internal

a. STRENGTH (kekuatan)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.
2. Tersedianya sumber daya manusia.
3. Tersedianya sumber dana.
4. Penyusunan prosedur pelayanan dan sanksi bagi yang melanggar peraturan.

b. WEAKNESS (kelemahan)

1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja.
2. Kurangnya pelatihan bagi aparaturnya dan personal lapangan.
3. Penegakan terhadap peraturan.

2.3.2.2 Eksternal

a. OPPORTUNITY (Peluang)

1. Ketertiban dan ketentraman merupakan hak masyarakat.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang tertib dan tentram;
3. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah dan kepolisian.

b. Tantangan

1. Meningkatnya kegiatan yang berasal dari tuntutan masyarakat terhadap kebijakan di daerah dan nasional.
2. Mengembangkan dukungan Masyarakat terhadap lingkungan yang tertib.

2.3.2 Rekomendasi

Formulasi atas isu-isu penting perlu dibuatkan Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan sebagai Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan sesuai dengan Pemendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasioanal Satuan Polisi Pamong Praja.

2.3.3.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan misi organisasi. Dari hasil analisa faktor lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi oleh Satpol PP, maka terdapat beberapa strategi yang disiapkan dalam rangka mewujudkan misi Satpol PP, yaitu:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan mempertahankan kondisi sarpras agar dalam keadaan selalu siap untuk digunakan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
3. Peningkatan kualitas disiplin aparatur;
4. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing personel;
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) yang berkualitas;
7. Peningkatan kegiatan patroli pencegahan dan pembinaan serta pengawasan dan penindakan atas gangguan penyakit masyarakat;
8. Peningkatan kerjasama dalam melaksanakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
9. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertib dan tentram;
10. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan

- suasana tenteram dan tertib di masyarakat; dan
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran.

2.3.3.2 Kebijakan

Semangat otonomi daerah yang menjadi landasan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintahan tingkat Kabupaten, maka Satpol PP dalam mengeluarkan kebijakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat mencerminkan semangat otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi dalam perumusan kebijakan dan implementasinya. Dalam penyusunan kebijakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat sub pemadam kebakaran ke depan harus pula mengacu pencapaian tujuan dalam misi, membidik sasaran yang hendak dicapai oleh Satpol PP serta strategi pemecahan masalah yang dihadapi. Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan guna mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dan upaya mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengatur serta memfasilitasi pelayanan kepada publik, maka kebijakan Satpol PP, diantaranya, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran serta non kebakaran;
3. Menyediakan fasilitas disiplin aparat Satpol PP;
4. Memberikan kesempatan yang adil kepada setiap personil untuk mengikuti diklat dan pendidikan atau

- meningkatkan pendidikan;
5. Menyusun dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 6. Memfasilitasi upaya pencegahan dan penindakan atas gangguan ketentraman ketertiban umum melalui mediasi dengan nuansa hak asasi manusia (Satpol PP Yang Humanis);
 7. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Satpol PPP Kabupaten Katingan dan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 8. Mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 9. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan swadaya dan prakasa masyarakat dalam memelihara ketentraman dan keamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat; dan
 10. Mendorong dan memfasilitasi kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi Masyarakat melalui kegiatan edukasi pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Program Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, hal tersebut agar dalam perencanaan tetap konsistensi dengan

dokumen perencanaan yang ada pada RPD dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Secara spesifik review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada Tabel II.3

Tabel II.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Katingan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				25.071.896.000,00					25.071.896.000,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Katingan	Nilai LAKIP	B	20.966.227.449,00		Kab Katingan	Nilai LAKIP	B	20.966.227.449,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Katingan	Persentase Dokumen Laporan Disusun	100 Persen	45.870.000,00		Kab Katingan	Persentase Dokumen Laporan Disusun	100 Persen	45.870.000,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Katingan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	3 Dok	45.870.000,00		Kab Katingan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	3 Dok	45.870.000,00	

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Katingan	Jumlah Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	53 Org	6.000.535.963,00		Kab Katingan	Jumlah Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	53 Org	6.000.535.963,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Katingan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Org	6.000.535.963,00		Kab Katingan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Org	6.000.535.963,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Katingan	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	80 Persen	522.293.750,00		Kab Katingan	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	80 Persen	522.293.750,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Katingan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	343.293.750,00		Kab Katingan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	343.293.750,00	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Katingan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	179.000.000,00		Kab Katingan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	179.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Katingan	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1.211.308.843,00		Kab Katingan	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1.211.308.843,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Katingan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	52.035.389,00		Kab Katingan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	52.035.389,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Katingan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Paket	150.108.176,00		Kab Katingan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Paket	150.108.176,00	

			Disediakan					Disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Katingan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	391.131.574,00		Kab Katingan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	391.131.574,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Katingan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	85.615.481,00		Kab Katingan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	85.615.481,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Katingan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.920.000,00		Kab Katingan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.920.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kab Katingan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.498.223,00		Kab Katingan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.498.223,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Katingan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	500.000.000,00		Kab Katingan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	500.000.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Katingan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	1.226.578.093,00		Kab Katingan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	1.226.578.093,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Katingan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	710.400.000,00		Kab Katingan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	710.400.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor	Kab Katingan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Kantor yang di Bangun	1 Unit	350.000.000,00		Kab Katingan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Kantor yang di Bangun	1 Unit	350.000.000,00	

	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Katingan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	35 Unit	166.178.093,00		Kab Katingan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	35 Unit	166.178.093,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Katingan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	10.496.594.000,00		Kab Katingan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	10.496.594.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Katingan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	10.000.000,00		Kab Katingan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	10.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Katingan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00		Kab Katingan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Katingan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.186.594.000,00		Kab Katingan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.186.594.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Katingan	Persentase Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 Persen	1.463.046.800,00		Kab Katingan	Persentase Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 Persen	1.463.046.800,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Katingan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	1.233.520.800,00		Kab Katingan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	1.233.520.800,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Kab Katingan	Jumlah Peralatan dan Mesin	11 Unit	29.526.000,00		Kab Katingan	Jumlah Peralatan dan Mesin	11 Unit	29.526.000,00	

	dan Mesin Lainnya		Lainnya yang Dipelihara					Lainnya yang Dipelihara			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Katingan	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00		Kab Katingan	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Katingan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen	3.305.668.551,00		Kab Katingan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen	3.305.668.551,00	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Katingan	Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	100 Persen	1.900.377.952,00		Kab Katingan	Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	100 Persen	1.900.377.952,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Katingan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	149.350.000,00		Kab Katingan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	149.350.000,00	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab Katingan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	550.650.000,00		Kab Katingan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	550.650.000,00	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Kab Katingan	Jumlah SDM Satuan Polisi	6 Orang	200.000.000,00		Kab Katingan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	2 Dokumen	200.000.000,00	

	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab Katingan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	150.000.000,00		Kab Katingan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	150.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab Katingan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 laporan	550.334.287,00		Kab Katingan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 laporan	550.334.287,00	
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab Katingan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	6 Laporan	300.043.665,00		Kab Katingan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	6 Laporan	300.043.665,00	
	Kegiatan Penegakan	Kab	Jumlah Perda	4 Perda	1.325.090.599,00		Kab	Jumlah Perda	4 Perda	1.325.090.599,00	

	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Katingan	yang ditegakan				Katingan	yang ditegakan			
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab Katingan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	3 Laporan	75.090.559,00		Kab Katingan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	3 Laporan	75.090.559,00	
	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab Katingan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	1.250.000.000,00		Kab Katingan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	1.250.000.000,00	
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab Katingan	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Diklat	2 Orang	80.200.000,00		Kab Katingan	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Diklat	2 Orang	80.200.000,00	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Katingan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	80.200.000,00		Kab Katingan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	80.200.000,00	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab Katingan	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15 Menit	800.000.000,00		Kab Katingan	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15 Menit	800.000.000,00	

	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Katingan	Persentase Jumlah Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100 Persen	700.000.000,00		Kab Katingan	Persentase Jumlah Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100 Persen	700.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Katingan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	350.584.000,00		Kab Katingan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	350.584.000,00	
	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab Katingan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	25 Orang	234.560.000,00		Kab Katingan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	25 Orang	234.560.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab Katingan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai	10 Unit	114.856.000,00		Kab Katingan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai	10 Unit	114.856.000,00	

			Standar Teknis Terkait					Standar Teknis Terkait			
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab Katingan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang dilaksanakan	100 Persen	100.000.000,00		Kab Katingan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang dilaksanakan	100 Persen	100.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab Katingan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	100.000.000,00		Kab Katingan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 Orang	100.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana dokumen kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025, dalam era globalisasi dan cepatnya media komunikasi dan elektronik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dituntut untuk siap dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 serta Usulan dari masyarakat berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada Table II.4.

Tabel II.4
Program Dan Kegiatan Usulan Masyarakat Dari Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Katingan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KATINGAN

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	USULAN PRIORITAS KECAMATAN	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor	Tumbang Hiran	1 Unit	Pembangunan Pos Damkar Tumbang Hiran	
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Petak Bahandang	1 Kegiatan	Pelatihan Linmas Desa di Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan	
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Desa Karuing, Tampelas dan Galinggang	63 Stel/Pasang/Buah	Pengadaan Perlengkapan Baju, Sepatu dan Kopel Linmas	
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Desa Perigi, Teluk Sebuluh dan Mekar Tani	72 Stel/Pasang/Buah	Pengadaan Perlengkapan Baju, Sepatu dan Kopel Linmas	
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Desa Kampung Baru, Bangun Jaya dan Singam Raya	63 Stel/Pasang/Buah	Pengadaan Perlengkapan Baju, Sepatu dan Kopel Linmas	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP DAN DAMKAR

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 disusun dan mengacu dan berpedoman pada :

- a. Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan 2008-2025;
- c. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024- 2026;
- d. Rancangan RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2025;
- e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Katingan 2024-2026.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terpadu dan berkesinambungan melalui penelaahan isu strategis rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan sasaran pokok untuk RPJPD ke IV (RPJMN Tahun 2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan fokus pembangunan, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif;
4. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Adapun beberapa isu strategis nasional pada rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, diantaranya adalah :

1. Penciptaan nilai tambah dan devisa, serta tantangan pemanfaatan sumber pertumbuhan baru (Pariwisata dan Ekonomi Digital/Kreatif)
2. Optimalisasi bonus demografi perlu dilakukan melalui Pembangunan manusia yang yang holistik dan terintegrasi
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Pembangunan infrastruktur dan penurunan ketimpangan antar wilayah
5. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah
6. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah
7. Daya Dukung dan Daya Tampung SDA dan LH
8. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)

Adapun tema Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan

mengusung thema “**Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia**”, dengan menitik beratkan pada beberapa prioritas pembangunan.

Selanjutnya melakukan berbagai upaya-upaya melalui arah kebijakan Pembangunan Bidang Urusan guna menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 juga mendasari arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas serta sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan, meliputi :

1. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan
2. Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat
3. Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
4. Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah
5. Reformasi Birokrasi
6. Kemandirian Desa Sebagai Basis Pertumbuhan yang Berkeadilan
7. Kerentanan Hubungan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan tahun 2025 dengan thema “**Mendorong pembangunan infrastruktur pelayanan publik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan**”, pada beberapa prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan guna mendukung arah kebijakan mensinergitaskan program pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan sebagai berikut :

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUN RKPD 2025
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL			DASAR HUKUM	TUJUAN/ SASARAN	
NO	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan koordinasi dan pengawasan trantibumlinmas dalam penegakan peraturan daerah	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM; 3. Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota; 4. Permendagri No.121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab./Kota	1. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal. 2. Meningkatnya cakupan layanan kebakaran	
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI					
	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	Pemantapan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui upaya pendekatan social budaya dan moderasi beragama		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui upaya pendekatan social budaya dan moderasi beragama	

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Sebagai acuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam hal mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran, yakni;

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan Tahun 2025;
2. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas Pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Terwujudnya konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan yang dicapai;
4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya manusia secara efisien, efektif, yang berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Tercukupinya sarana prasarana Satpol PP dan Pemadam kebakaran dalam mendukung pelayanan publik Trantibumtranmas dan Sub bidang kebakaran;
6. Terbentuknya UPTD Pemadam Kebakaran guna melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Teknis Daerah atau Pemadam Kebakaran berdiri secara mandiri Hasil Rakornas tanggal 5 Maret 2019 Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Terlaksananya sosialisasi Perda yang menjadi kewenangan Satpol PP Kabupaten Katingan.

Tabel III.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI EKSISTING 2022	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				KET
					2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan Satpol.PP dan Damkar	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kelembagaan	Nilai SAKIP	69,50	69,60	69,65	69,70	69,75	
2.	Meningkatkan rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan social budaya lokal	Meningkatnya rasa aman dan nyaman serta bebas dari resiko kebakaran di lingkungan masyarakat	Persentase penanganan kasus K3	100	100	100	100	100	
			Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Kebakaran	15	15	15	15	15	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP DAN DAMKAR

4.1. PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran dan arah kebijakan dalam hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar serta pendanaan yang tertuang dalam RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar tahun 2024, terdiri dari 3 Program dan 11 Kegiatan serta 29 Sub Kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

4.2. KEGIATAN

Adapun rencana kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 jo Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6) Penyediaan Bahan/Material;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - 4) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 5) Pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - 6) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pengangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 2) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
10. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
11. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
 - 1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

12. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, meliputi sub kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam mencegah dan Penggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Tabel IV.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Katingan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Katingan
Tahun 2025

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									20.966.227.449,00				16.077.208.108,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									45.870.000,00				45.870.000,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Nilai LAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	3 Dok	3 Dok	45.870.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	45.870.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6.000.535.963,00				6.000.535.963,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Nilai LAKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Kasongan Lama	B Predikat	53 Orang	53 Orang	6.000.535.963,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	6.000.535.963,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									522.293.750,00				179.000.000,00

1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Nilai LAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Aparatur yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	1 Paket	100 Persen	343.293.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Nilai LAKIP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	20 Orang	100 Persen	179.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	179.000.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.211.308.843,00					821.420.000,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Nilai LAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Aparatur yang mendapat pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	3 Paket	100 Persen	52.035.389,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	60.000.000,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Nilai LAKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Aparatur yang mendapat pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	6 Paket	100 Persen	150.108.176,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	85.000.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

						Nilai LAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Aparatur yang mendapat pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	3 Paket	100 Persen	391.131.574,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	250.000.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Nilai LAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Aparatur yang mendapat pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	3 Paket	100 Persen	85.615.481,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	60.000.000,00
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Nilai LAKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Aparatur yang mendapat pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	2 Dok	100 Persen	7.920.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	7.920.000,00
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Nilai LAKIP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Aparatur yang mendapat pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Kasongan Lama	B Predikat	1 Paket	100 Persen	24.498.223,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.500.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Nilai LAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Aparatur yang mendapat pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	20 Laporan	100 Persen	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	350.000.000,00

1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.226.578.093,00					400.000.000,00
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Nilai LAKIP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Kasongan Lama	B Predikat	1 Unit	3 Paket	710.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Nilai LAKIP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	1 Unit	3 Paket	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Nilai LAKIP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	35 Unit	3 Paket	116.718.093,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	200.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10.496.594.000,00					6.800.462.145,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

						Nilai LAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	4 Laporan	12 Bulan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.500.000,00
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Nilai LAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	12 Laporan	12 Bulan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Nilai LAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	12 Laporan	12 Bulan	10.186.594.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.705.962.145,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.463.046.800,00					1.008.500.000,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Nilai LAKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	35 Unit	33 Unit	1.233.520.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	800.000.000,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

						Nilai LAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Kasongan Lama	8 Predikat	11 Unit	33 Unit	29.526.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	8.500.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Nilai LAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Katingan, Katingan Hilir, Kasongan Lama	8 Predikat	1 Unit	33 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								3.305.668.551,00					2.210.000.000,00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								1.900.377.952,00					1.800.000.000,00
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
						Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	149.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	200.000.000,00

1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
						Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	550.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	500.000.000,00
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
						Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	6 Orang	100 Persen	200.000.000,00			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang	200.000.000,00
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
						Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	150.000.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	150.000.000,00
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													

					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	50 laporan	100 Persen	550.334.287,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	48 laporan	400.000.000,00
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa											
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diselesaikan	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	300.043.665,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan	350.000.000,00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							1.325.090.599,00				330.000.000,00
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah											
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Perda yang ditegakan	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Laporan	4 Perda	75.090.599,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	3 Laporan	80.000.000,00
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											

					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda yang ditegakan	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	6 Laporan	4 Perda	1.250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	250.000.000,00
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							80.200.000,00				80.200.000,00
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS											
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Diklat Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Diklat	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	2 Orang	80.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	80.200.000,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							800.000.000,00				910.000.000,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							700.000.000,00				710.000.000,00
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
					Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Menit	12 Laporan	100 Persen	350.584.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	360.000.000,00
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran											

						Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Menit	10 Orang	100 Persen	234.560.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	7 Orang	150.000.000,00
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri												
						Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Menit	10 Unit	100 Persen	114.865.000,00	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	25 Unit	200.000.000,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								100.000.000,00				200.000.000,00
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat												
						Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahun	Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Menit	80 Orang	80 Orang	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	80 Orang	200.000.000,00
TOTAL													25.071.896.000,00				19.197.208.108,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Katingan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub.kegiatan tahun 2025. Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD adalah sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD .
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan Tahun 2025 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Semoga renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Kasongan, Agustus 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAM PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KATINGAN**



PIMANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19650107 198603 1 014